



**PEMERINTAH KOTA BATAM
RENCANA KERJA (RENJA)
AKHIR
TAHUN 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DPPAKB)
KOTA BATAM TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (RENJA) ini ditetapkan sebagai proyeksi dini dan arah pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 yang berpedoman kepada matriks RENSTRA 2021-2026. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025.

Semoga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Batam, 19 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	10
2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	52
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	54
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	84
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	85
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	85
3.2. Visi dan Misi Kota Batam	91
3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	92
3.4. Program dan Kegiatan	94
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	116
BAB V. PENUTUP	141

Lampiran

SK Tim Renja Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada RPJMD.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan dari semangat Otonomi Daerah, serta mengacu kepada UUD 1945 pasal 27 tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga Negara tidak ada kecualinya, Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, kemudian adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (PTPPO), Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dimana dari latar belakang undang-undang sebagaimana disebutkan diatas bahwa diamanatkan disetiap daerah diwajibkan untuk melaksanakan amanat tersebut sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan, oleh karena Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagai lembaga organisasi pemerintahan sangat diperlukan, dan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam telah diberikan mandat dan wewenang untuk membuat program kebijakan dalam urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kota Batam.

Selain beberapa hal yang telah diuraikan diatas maka latar belakang dibuatnya renja adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan dan bernegara secara terus menerus yang berkesinambungan, dan dalam melaksanakan otonomi daerah perlu dilaksanakan beberapa hal; **pertama** memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender melalui kebijakan nasional secara optimal dan memadai sesuai tuntutan umum dari masyarakat agar aparat pemerintah memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. **Kedua** pelayanan prima harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata laksana layanan umum terutama untuk meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan serta Keluarga Berencana dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat.

Dengan adanya tuntutan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sejahtera, maka kedudukan peran perempuan perlu mendapat perhatian, ditingkatkan terus dan dikedepankan terutama di tingkat Kabupaten/Kota karena perempuan merupakan salah satu unsur komponen dari bagian masyarakat yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan, Rendahnya pendidikan yang dimiliki kaum perempuan di bidang kesehatan dan kesehatan reproduksi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemerintahan maupun legislatif hal ini selanjutnya akan berdampak kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan RENJA ini adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Nasional
- 8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Di Daerah Batam
- 9) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 10) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 13) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 14) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 15) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- 16) Peraturan Walikota Batam Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- 17) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 18) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- 20) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
- 21) Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- 22) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022
- 23) Perwako Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2022
- 24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0378 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 26) Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- 27) Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam;
- 28) Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026
- 29) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah :

- a. Sinkronisasi antara RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Renja dengan mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
- b. Tersedianya sebuah dokumen perencanaan yang memuat program kerja yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
- c. Untuk memudahkan dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Untuk memberikan arah dan kebijakan terhadap struktur dan pedoman kerja dan pola kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun dokumen perencanaan.
- e. Untuk mensinergikan antara kebijakan dan program yang ada didalam Renstra dengan renja yang disusun setiap tahunnya, dan sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini berisikan Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum juga bagaimana Sistematika Penulisan Renja ini.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Pada bab II ini diuraikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2024.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab III ini berisikan tentang Tujuan, sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN

Pada bab IV ini diuraikan tentang Program, kegiatan, Indikator kinerja, adanya tujuan dan kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB V PENUTUP

Lampiran

SK Tim Renja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB II

**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Instansi. Tolok ukur keberhasilan kinerja tersebut mengacu pada ketercapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Kota Batam
2. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak
3. Terkendalinya pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Keempat sasaran yang ingin dicapai tersebut pada Tahun 2023 mempedomani Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas keputusan Mendagri Nomor: 050.5883 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah yang dituangkan melalui 10 program, 20 Kegiatan dan 42 sub kegiatan mendasar yang secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan berorientasi pada ketercapaian sasaran dimaksud. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Rencana Kinerja dan sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 digambarkan capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2023 dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA DP3APPKB

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2023
Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.08.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.08.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	42 Orang	45 Orang	47 orang	100%	39 Orang	44 Orang	25%
2.08.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	7 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	0	0	0
2.08.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%

2.08.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	0	0
2.08.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	0	0
2.08.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0	0%
2.08.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25%
2.08.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	2 Paket	2 paket	100%	2 Paket	0	0%
2.08.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%

2.08.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.08.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	0	0	0	0	0	0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	0	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	1 Unit	20%
2.08.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.08.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%

2.08.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
2.08.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.08.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	25%
2.08.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	25%

2.08.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	60 Unit	34 Unit	17 Unit	100%	60 Unit	0	0%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,50 / 75%	13,87%/71 %	11.30%/70%	10,40% /79%	92%/100%	11.40% / 70%	2%	17%
2.08.02.2 .01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil	80%	90.90%	70%	97.67%	100%	75%	30%	45%
2.08.02.2 .01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	44 Dokumen	35 Dokumen	42 Dokumen	100%	35 Dokumen	20 Dokumen	66%

2.08.02.2 .02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina	80%	71%	70%	70%	100%	75%	8%	10%
2.08.02.2 .02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0	0%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.08.03.2 .01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	100%	40%	100%	100%	40%	10%	25%

2.08.03.2 .01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Dokumen	65 Dokumen	59 Dokumen	43 Dokumen	73%	59 Dokumen	20 Dokumen	33%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	5.0	4.33	4.50	7.7%	100%	4.75%	1%	21%
2.08.04.2 .01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	80%	77%	70%	70%	100%	75%	8%	10%
2.08.04.2 .01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0	0%

2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	80%	70%	70%	70%	100%	75%	20%	26%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	80%	70%	70%	80.00%	100%	75%	20%	26%
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	44 Dokumen	20 Dokumen	45%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	820	900 Skor	780 Skor	950 Skor	100%	800	427 Skor	54%

2.08.06.2 .01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	70%	72%	66%	72%	100%	68%	15%	23%
2.08.06.2 .01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	1 Dokumen	20%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.08.07.2 .01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	75%	100%	75%	100%	100%	75%	50%	75%

2.08.07.2 .01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	40 orang	0	0	0%	0%	40 SDM	0	0%
2.08.07.2 .03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	55%	30%	30%	100%	30%		
2.08.07.2 .03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	0	0	0	0	40 Orang		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									

2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	60%	100%	40%	100%	100%	50%	5%	10%
2.14.02.2 .01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	60%	47%	40%	47%	100%	50%	5%	10%
2.14.02.2 .01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.02.2 .02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100%/ 50%	83.3%	100%	83.3%	83.3%	100% / 40%	10%/10%	10%/25%

2.14.02.2 .02.0009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
2.14.02.2 .02.0012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	0%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	83.0 /8.50	82.63	81.0	82.18%	100%	82.0 / 9.0	25%/3	30%/32%
2.14.03.2 .01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 50%	83.3% / 50%	100% / 50%	83.3% / 50%	83.30%	100% / 45%	10% / 10%	10% /25%

2.14.03.2 .01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	96 Organisasi					96 Organisasi	20 Organisasi	20%
2.14.03.2 .01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0	

2.14.03.2 .01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Unit					0%	0	
2.14.03.2 .01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	0	

2.14.03.2 .01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	0	
2.14.03.2 .01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	

2.14.03.2 .01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	0	
2.14.03.2 .02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	70%	70%	70%	100%	70%	15%	21%
2.14.03.2 .02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	5 Organisasi							
2.14.03.2 .02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	552 Orang	522 Orang	532 Orang	535 Orang	100%	542 Orang	120 Orang	22%

2.14.03.2 .03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	84%	81%	82%	82%	100%	83%	10%	12%
2.14.03.2 .03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
2.14.03.2 .03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	625 Orang	2474 Orang	575 Orang	3183 Orang	100%	600 Orang	201 Orang	33%

2.14.03.2 .03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	0				20 Unit	0	0%
2.14.03.2 .03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
2.14.03.2 .04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif	70%	70%	70%	70%	100%	70%	12%	21%

2.14.03.2 .04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	13 Kampung	100%	13 Kampung	3 Kampung	25%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	60%	45%	50%	50%	100%	55%	18%	31%
2.14.04.2 .01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%	10%

2.14.04.2 .01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	60 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	0	0%
2.14.04.2 .01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%

2.14.04.2 .01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	450 Orang	1632 Orang	350 Orang	1632 Orang	100%	400 Orang	100 Orang	30%
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

2.08.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	0	0	0	0		
2.08.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0	0	0	0	0		
2.08.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.08.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	0	0	0%	0%	1 Unit		

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
2.08.03.2 .02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	55%	30%	30%	100%	40%	10%	25%
2.08.03.2 .02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	33 Layanan	18 Layanan	43 Layanan	100%	17 Layanan	7 Layanan	41%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%

2.08.07.2 .02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%	100%	65%	100%	100%	65%	50%	75%
2.08.07.2 .02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	52 Layanan	109 Layanan	59 Layanan	132 layanan	100%	55 Layanan	46 Orang	83%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Mayoritas kegiatan DP3AP2KB yang bersentuhan dengan masyarakat terkait pelayanan telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Sebagai berikut gambaran pelaksanaan pada masing-masing program, kegiatan dan Sub kegiatan pada tahun 2023.

2.2.1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup, dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Batam. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan perempuan untuk melangsungkan kehidupan yang berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial yang mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga secara umumnya.

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui 77 Tim Penggerak PKK yang dibentuk dalam upaya pencapaian Keluarga harmonis dan sejahtera. Sepanjang Tahun 2023 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Pembinaan akhlak mulia bagi kader dan pengurus PKK sebanyak 5100 orang di 12 Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan moril dan spiritual perempuan dalam keluarga. Kegiatan ini dipandang perlu untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan sesama dalam upaya mencapai keselarasan hidup bermasyarakat dalam keberagaman. Demikian halnya melalui kegiatan ini juga telah terlaksana HKG PKK, Halal Bi Halal dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan melalui Pelatihan Kuliner, Pelatihan Tata Rias yang melibatkan 21.062 orang perempuan Kota Batam yang memberikan semangat dan motivasi dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mampu berkontribusi dan berperan aktif dalam membangun ekonomi kota Batam. Pelatihan ini mencakup Pelatihan Tataboga/Kuliner bagi 3517 orang, pelatihan tata rias bagi 630 orang dan pelatihan Publik Speaking bagi 1065 orang perempuan Kota Batam. Dengan metode ini perempuan Kota Batam khususnya ibu rumah tangga ekonomi lemah dapat memiliki daya cipta dan menghasilkan produk yang bernilai jual di pasaran sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga yang berperan dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan Kota Batam. Capaian Realisasi Keuangan kegiatan ini 97.23% dengan pencapaian fisik kegiatan sebesar 100%.

2.2.2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Melalui program ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupaya mewujudkan kualitas hidup perempuan yang berhaluan pada kesetaraan gender dan peningkatan akses publik bagi kaum perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Perempuan diberikan pembekalan dalam upaya peningkatan kompetensi dan wawasan pembangunan yang turut andil setara dengan kaum laki-laki. Sasaran kegiatan ini pada akhirnya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kota Batam yang pada tahun 2023 di proyeksikan pada angka IPG 94.46 dan IDG 58.50 dan pencapaian IPG Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 94.75 sedangkan IDG Kota Batam sebesar 58.65. Program ini dituangkan dalam 2 kegiatan yaitu:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota

Melalui Kegiatan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mengupayakan penerapan kesetaraan gender di Kota Batam. Tujuan kegiatan ini agar setiap kegiatan/program OPD memuat atau merumuskan

cakupan-cakupan keselarasan gender dalam kegiatan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Melalui kegiatan ini terlaksana pelatihan PPRG(GAB/GBS) bagi perencana se-kota Batam. Dan capaian Anggaran Responsif Gender tercapai pada angka 10.40% dari total belanja langsung APBD kota Batam (sebesar Rp. 342.810.964.575,- dari total belanja langsung Rp. 3.298.348.071.263) Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar 91.51% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub kegiatan

a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Melalui kegiatan ini telah terlaksana pelatihan Tata Rias bagi 630 orang Ibu rumah tangga yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi dan keterampilan kaum perempuan yang mendukung peningkatan ekonomi keluarga sejahtera. Demikian halnya terlaksana Talkshow kesehatan bagi 220 orang perempuan bersamaan dengan peringatan Hari Kartini dengan tujuan untuk meningkatkan semangat perjuangan kaum perempuan dalam menggali potensi dan sumberdaya di berbagai bidang pembangunan berbangsa dan bermasyarakat. Capaian fisik kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 98.18%.

2.2.3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini dilaksanakan dalam upaya penyediaan basis data gender dan anak yang mengakomodir pelaksanaan Anggaran Responsif Gender GAB/GBS dalam pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Batam. Dan dilaksanakan melalui kegiatan

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Pada tahun 2023 Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan anggaran yang terealisasi sebesar 97.96 % dan capaian fisik kegiatan sebesar 100%. Muatan kegiatan ini mengakomodir Pelatihan dan Penguatan Data PPRG OPD dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA. Pelatihan dan Penguatan Data PPRG Kecamatan dalam Penggunaan Aplikasi E-SIPUGA yang diharapkan memberikan pemahaman perangkat daerah dalam merencanakan penganggaran yang berporos pengarusutamaan gender.

2.2.4. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Mengingat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak, maka dipandang sangat perlu untuk memberikan pemahaman tentang Perda perlindungan Perempuan dan Anak ini kepada masyarakat luas. Sering sekali perempuan dan anak menjadi target dan korban kekerasan yang tak jarang meninggalkan trauma fisik dan psikologis jangka panjang yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas generasi bangsa yang produktif. Maka melalui kegiatan ini Dinas pemberdayaan Perempuan berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat baik melalui sosialisasi dan penyuluhan agar hak-hak anak dan perempuan dapat diperoleh sebagaimana mestinya. Dalam Pelaksanaan Kegiatan ini juga melibatkan tim P2TP2A dan Tim KPPAD yang sudah terbentuk dan berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Secara garis besar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dalam pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Sampai dengan akhir 2023 terdapat 43 total kasus kekerasan terhadap perempuan yang sudah ditangani dengan baik. Realisasi kegiatan ini telah mengakomodir pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan Anak Kota Batam (3x), Pembekalan Satgas Kelurahan Bebas Kekerasan dan Rapat Koordinasi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Capaian realisasi keuangan dari kegiatan ini sebesar 90.80 dan realisasi fisik sebesar 100%.

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 66.40% dan capaian fisik sebesar 90%

2.2.5. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023 diakomodir dari belanja Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) yang secara umum pelaksanaannya sesuai dengan juknis dari kementerian.

Program ini dituangkan dalam 1 kegiatan utama di bawah ini:

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Sampai dengan akhir tahun 2023 kekerasan terhadap anak mencapai 132 kasus. Ini adalah angka yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam. Diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan layanan khusus dalam penanganan dan pencegahan kasus

kekerasan pada anak. Alokasi anggaran kegiatan ini terealisasi sebesar 75.46% dengan realisasi fisik sebesar 90%. Sejumlah persoalan tidak terserapnya anggaran secara maksimal karena penanganan kasus kekerasan tidak sampai kepada proses medis maupun penanganan medicolegal yang dimuat dalam kerangka anggaran belanja kegiatan ini.

2.2.6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang baik di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Melalui Kegiatan ini tahun 2023 telah terbentuk Forum Anak di 12 Kecamatan se-Kota Batam dan 41 Kelurahan dan Demikian halnya KPPAD Kota Batam sebagai komisi pengawas yang menjadi salah satu substansi kegiatan ini turut berperan aktif dalam mengkampanyekan hak-hak anak dan program-peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Kota Batam. Kegiatan ini juga mengakomodir Honorarium KPPAD Kota Batam dan pelaksanaan Penilaian Kota Layak Anak yang pada tahun 2023 mencapai 950 Skor dan meraih peringkat Nindya. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini sampai mencapai 100% dengan alokasi anggaran sebesar 97.64%.

2.2.7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mencetuskan Program Pembinaan Keluarga Berencana sebagai salah satu program yang terus akan diwujudkan sesuai dengan yang termaktub dalam RPJMD. Dalam capaian program ini diwujudkan langkah-langkah progresif untuk menekan angka kelahiran penduduk, melaksanakan penyuluhan Keluarga Berencana, dan memberikan pemikiran cerdas terhadap generasi muda Kota Batam tentang bahaya seks bebas, PMS dan HIV/AIDS dan penggunaan obat-obat terlarang (narkoba). Sebagian besar kegiatan dalam program ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat. Program ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Realisasi Keuangan 91.68 % dan capaian fisik 100 % melalui pelaksanaan Pelayanan KB Gratis dan penyuluhan KB di kecamatan dan kelurahan Kota Batam.

Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga untuk

mewujudkan keluarga sejahtera sebagai pilar utama pembangunan kota Batam. Capaian CPR Kota Batam pada tahun 2023 sebesar 82.63 %

b. Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir media informasi program pembangunan keluarga dan informasi Keluarga Berencana bagi kader KB dan PIK-Remaja Kota Batam. Realiasi Keuangan sebesar 98.90% dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Kegiatan ini mengakomodir Pembayaran Air, Listrik dan Internet untuk Balai Penyuluhan di 12 kecamatan (bulan januari s.d Mei), penyuluhan bagi kader berbasis data kependudukan pada 12 kecamatan. Realiasi Keuangan sebesar 84.15% dan realisasi fisik sebesar 90%

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan ini mengakomodir Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD pada 12 kecamatan. Dan realisasi keuangan sampai akhir tahun 2023 sebesar 100 % dengan capaian fisik sebesar 100 %.

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Melalui kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan telah mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke 317 Fasilitas kesehatan KB se-Kota Batam yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah akseptor Aktif KB pada tahun 2023. Realisasi Keuangan sebesar 93.97% dan fisik 100%.
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Realisasi Keuangan sebesar 43.87 % dan fisik sebesar 85 %
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program keluarga berencana dan pembangunan kependudukan baik melalui lokakarya mini maupun penyuluhan program keluarga berencana.

Penggerakan Kampung KB ini merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Realisasi keuangan 89.81 % dan fisik sebesar 95%

2.2.8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

Muatan kegiatan ini berupa pengadaan KIT Siap Nikah Stunting sebanyak 35 Unit dan BKB KIT Stunting sebanyak 25 unit yang diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok Bina Keluarga Balita di Posyandu dan sekolah-sekolah yang memiliki jalur PIK-R (Pusat informasi Konseling Remaja) se-kota Batam dalam upaya mensukseskan program pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga sejahtera (i bangga). Serapan anggaran kegiatan ini sebesar 65.28% dengan Realisasi fisik kegiatan sebesar 90%

- b. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Realisasi Keuangan 94.43% dan fisik 100 %

Dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga, sampai dengan Tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 430 kelompok kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga yang menysasar ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan khusus(baik dalam menjahit, memasak, tata rias dan lainnya) yang dapat dikembangkan dan menghasilkan produk-produk yang bernilai jual di kalangan masyarakat kota Batam. Melalui kegiatan ini juga terbentuk kelompok tribina sebagai salah satu indikator pencapaian keluarga sejahtera. Sampai dengan tahun 2023 BKB HI terbentuk 179 kelompok, BKL terbentuk 27 kelompok, dan BKR terbentuk 39 kelompok. Untuk membuka wawasan dan pengetahuan remaja di Kota Batam juga dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada remaja. Kondisi remaja pada masa kini telah memasuki tahap yang memperhatikan. Terbukanya secara luas sistem jaringan internet telah banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja dewasa ini. Remaja cenderung pasif dan kurang kreatif bahkan kerap kali terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengkonsumsi narkoba. Melalui Pembentukan PIK-R di sekolah-sekolah maupun jalur masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam dengan gencar memaparkan program remaja yang berencana untuk meraih masa depan gemilang yang bebas dari narkoba dan sex bebas. Sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk PIK-R sebanyak 66 kelompok yang diharapkan menjadi pioner bagi remaja Kota Batam dalam mewujudkan remaja cerdas berencana dan unggul.

2.2.9. Program Pengendalian Penduduk

Program ini memuat kebijakan daerah dalam sistem kependudukan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Batam pada periode 5 tahun RPJMD. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat disusun basis data pembangunan kependudukan yang berhaluan kepada penataan wilayah dan akses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Program ini diakomodir melalui kegiatan:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 telah disusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang diharapkan dapat menjadi haluan perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan. Realisasi keuangan sebesar 94.60% dan realisasi fisik 100%.
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB. Realisasi Keuangan sebesar 95.46%, dan capaian fisik sebesar 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Batam

Tabel T.C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1 (TRW I)	Tahun n	Tahun n+1	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94.46 %	94.48 %	94.50 %	94.52 %	94.75 %	21.02 %	94.50 %	94.52 %	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			58.50 %	58.55 %	58.60%	58.65 %	58.65 %	10%	58.60 %	58.65 %	
3	Persentase Penurunan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak			6.0%	6.5%	7.0%	7.5%	Kasus Meningkat 23%	25%	7.0%	7.5%	
4	Angka Kelahiran Total (TFR)			2.34%	2.32%	2.30%	2.28%	2.16%	0.5%	2.30%	2.28%	
5	Indeks Pembangunan Keluarga			57.26 %	57.28 %	57.30%	57.32 %	59.76 %	18%	57.30 %	57.32 %	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Isu-isu strategis yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Masih lemahnya komitmen stakeholder terkait dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembangunan berbasis gender
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Rendahnya kualitas hidup perempuan implikasi dari rendahnya kapasitas SDM perempuan kota Batam
4. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam pembangunan
5. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Tingginya minat pencari kerja yang masuk ke Kota Batam meningkatkan jumlah pasangan usia produktif yang rentan terhadap penambahan angka kelahiran penduduk;
7. Luasnya keterbukaan akses informasi dan teknologi yang dilatarbelakangi oleh letak geografis kota Batam sebagai wilayah border /perbatasan rentan terhadap peningkatan kenakalan remaja yang berdampak kepada perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan pernikahan usia dini;

8. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah dalam upaya menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera I dan Pra Sejahtera II
9. Terbatasnya jumlah penyuluh KB/petugas lapangan KB sebagai koordinator pelaksanaan program bangga kencana di lapangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL T-C 3.1

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam**

Kode	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisa Kebutuhan 2025					Cat Pent ing
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif (Rp)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20,376,564,806	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22,688,471,387	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				13,451,384,806	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK				15,238,809,891	

2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	9,897,552,287	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	11,684,977,372	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	8,966,094,687	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10,592,778,622	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang /bulan	8,966,094,687.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang /bulan	10,592,778,622.00	
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	283,449,550	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	283,449,550	

2.08.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,996,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,996,000.00	
2.08.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	47,742,050.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	47,742,050.00	
2.08.01. 2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,838,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,838,000.00	
2.08.01. 2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	18,036,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	18,036,000.00	
2.08.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,071,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,071,000.00	
2.08.01. 2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	192,766,500.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	192,766,500.00	

2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	393,938,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	393,938,000.00	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	174,338,000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	174,338,000	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	219,600,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	219,600,000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	82,200,050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	237,516,200	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81,300,050.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117,299,400.00	

2.08.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	120,216,800.00	
2.08.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	171,870,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	177,295,000	
2.08.01. 2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79,060,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	79,030,000.00	
2.08.01. 2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	7 Unit	75,350,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	7 Unit	80,805,000.00	

			Pajak dan Perizinannya			Lapangan		Pajak dan Perizinannya			
2.08.01. 2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	17,460,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	17,460,000.00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,50 / 75%	617,000,000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil	11,50 / 75%	617,000,000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang dibina dan berhasil	80%	152,000,000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang dibina dan berhasil	80%	152,000,000	

2.08.02. 2.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	152,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Dokumen	152,000,000.00	
2.08.02. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang dibina	80%	465,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan yang dibina	80%	465,000,000	
2.08.02. 2.02.000 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	465,000,000.00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	465,000,000.00	

			ta								
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	220,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	220,000,000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	220,000,000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	40%	220,000,000	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	12 Dokumen	220,000,000.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	220,000,000.00	

			Kabupaten/Kota					a			
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	5	2,046,312,519	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	5	2,046,312,519	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	80%	2,046,312,519.00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif	80%	2,046,312,519.00	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	2,046,312,519	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	2,046,312,519	

2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	80%	190,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG	80%	190,000,000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	80%	190,000,000.00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap	80%	190,000,000.00	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	190,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	190,000,000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	820	310,000,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	820	310,000,000	

2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	70%	310,000,000.00	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA	70%	310,000,000.00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	310,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	310,000,000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	170,520,000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	170,520,000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	75%	101,500,000.00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	75%	101,500,000.00	

2.08.07. 2.01.000 4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Batam	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	40 orang	101,500,000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Batam	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	40 orang	101,500,000	
2.08.07. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	69,020,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	69,020,000	
2.08.07. 2.03.000 6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kota Batam	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	69,020,000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kota Batam	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	69,020,000	

2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6,617,700,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,142,181,496	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	60%	358,200,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK	60%	358,200,000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	60%	45,000,000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan	60%	45,000,000	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 Dokumen	45,000,000.00	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 Dokumen	45,000,000.00	

			n (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 50%	313,200,000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 50%	313,200,000	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Kota Batam	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	60,000,000	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Kota Batam	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	12 Laporan	60,000,000	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	253,200,000.00	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	253,200,000.00	

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	83.0 /8.50	4,336,651,600	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need	83.0 /8.50	4,336,651,600	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 50%	1,389,203,600.00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi	100% / 50%	1,389,203,600.00	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	96 Organisasi	100,000,000.00	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra	96 Organisasi	100,000,000.00	

			dan Mitra Kerja					Kerja			
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	190,003,600	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Batam	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	190,003,600	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana	5 Unit	0	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan	5 Unit	0	

			(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	100,000,000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	100,000,000	

2.14.03. 2.01.001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	180,000,000.00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	180,000,000	
2.14.03. 2.01.001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	12 Laporan	739,200,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan	12 Laporan	739,200,000.00	

			n, dan Keluarga Berencana)					, dan Keluarga Berencana)			
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80,000,000.00	Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80,000,000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	192,000,000.00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase tenaga lini/kader yang aktif	70%	192,000,000.00	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	552 Orang	192,000,000.00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	552 Orang	192,000,000	

2.14.0 3.2.02. 0006	N/A		N/A		N/A	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5 Laporan	1,051,974,000.00	
---------------------------	-----	--	-----	--	-----	---	------------	--	-----------	------------------	--

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	84%	2,596,798,000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB	84%	2,596,798,000.00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	161,100,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	161,100,000	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	625 Orang	1,383,724,000.00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	625 Orang	1,383,724,000	

2.14.03. 2.03.000 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	1,051,974,000.00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Batam	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	0.00	
2.14.03. 2.03.000 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	0.00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	0.00	
2.14.03. 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Presentase kampung KB yang aktif	70%	158,650,000.00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Presentase kampung KB yang aktif	70%	158,650,000.00	

2.14.03. 2.04.000 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Batam	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Kampung	158,650,000.00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Batam	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	13 Kampung	158,650,000.00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	60%	1,922,848,400.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	60%	2,447,329,896.00	
2.14.04. 2.01.002 1	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	12 Laporan	94,259,969.00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	12 Laporan	94,259,969	

			PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			Keluarga Akseptor (UPPKA)		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Batam	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	450 Orang	1,708,588,431.00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Batam	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	450 Orang	2,233,069,927.00	

2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				307,480,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				307,480,000.00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	72,000,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	72,000,000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	12,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	12,000,000.00	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000.00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000	

2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	60,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	60,000,000.00	
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	60,000,000.00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	77,565,000.00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan	100%	77,565,000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	77,565,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk	30%	77,565,000.00	

2.08.03. 2.02.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	77,565,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Layanan	77,565,000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	157,915,000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan	100%	157,915,000	
2.08.07. 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%	157,915,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	65%	157,915,000	
2.08.07. 2.02.000 6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Batam	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	52 Layanan	157,915,000.00	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Batam	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	52 Layanan	157,915,000	

	TOTAL	20,376,564, 806	TOTAL	22,688,471, 387	
--	--------------	----------------------------	--------------	----------------------------	--

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TABEL T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2022
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Cat
1	2	3	4	5	6
1					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA dan BKKBN

3.1.1.1. Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak tahun 2020-2024 yang berperdoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020.

Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan kinerja pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan

kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni);
- c. Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar.

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja;
- d. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

3.1.1.2. Renstra BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki visi “Mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”,

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2020-2024 diatas, BKKBN memiliki misi: 1)

Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup, 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global, 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi, dan edukasi serta 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM Aparatur.

Adapun tujuan yang ingin di capai selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 yaitu : 1) mewujudkan keluarga berkualitas yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan Bahagia serta 2) mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia yang maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

Dalam hal ini BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa

tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Serta dalam upaya penguatan pelaksanaan 4 (empat) Sub Urusan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, BKKBN akan berupaya dalam tujuan paling utama untuk: a) Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas dengan menetapkan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistik alokon); pengembangan operasional pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB; serta penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB (RS, Klinik utama, Puskesmas, Praktek Dokter, Klinik Pratama, RS Daerah Pratama, praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan), jejaring pelayanan KB (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Puskesmas Pembantu, Poli Klinik Desa, Pos Kesehatan Desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB mobile (bergerak) di wilayah khusus/sulit, untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB; b) Peningkatan pembinaan peserta

KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksi (rasional, efektif dan efisien), dan peningkatan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi; c) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga, melalui; pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat - daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, tokoh agama (toga)/tokoh masyarakat (toma)/ tokoh adat (toda), sekolah dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai - nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi; peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi (Kespro) remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan Kespro bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK - KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan positif dalam meningkatkan status kesehatan, pendidikan, jiwa kepemimpinan, serta dalam penyiapan kehidupan berkeluarga; dan d) Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan Kependudukan dan KB. Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka telah disusun sasaran strategis BKKBN 2020-2024 yang

tertera pada Renstra BKKBN 2020-2024 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)
3. Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi/ Unmeet Need
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Perkawinan Pertama (MUKP)

3.3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, **Visi Kota Batam** adalah **”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”** dan **Misi** yang menjadi acuan penetapan tujuan Dinas sesuai RPJMD 2021-2026 adalah **“Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.”**

3.3.1. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam masa lima tahun mendatang sebagai penjabaran dari visi dan misi walikota Batam yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Batam. Tujuan ini juga disusun dengan mempedomani permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung RPJMD Kota Batam dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas P3APPKB Kota Batam menetapkan Tujuan:

“Meningkatkan Kesetaraan Gender serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menuju keluarga yang mandiri”

3.3.2. SASARAN

Sasaran Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis DP3AP2KB telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah disepakati, maka ditetapkan sasaran sehingga diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran dan program-program Dinas P3APPKB Kota Batam, sehingga diwaktu-waktu yang mendatang akan diperoleh hasil yang lebih baik.

- 1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan kota Batam***
- 2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak***
- 3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk***
- 4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga***

Dengan indikator kinerja utama:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Persentase Penurunan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
3. Angka Kelahiran Total (TFR)
4. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 :

Table T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025,
Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Batam
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025(Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (RENSTRA 2021-2026)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22,688,471,387				21,156,987,238
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15,238,809,891				13,490,704,806

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025

2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	11,684,977,372			100%	9,936,872,287
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	10,592,778,622			100%	9,017,815,737
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	62 Orang/bulan	10,592,778,622.00	PAD + DAU		62 Orang/bulan	9,017,815,737.00
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-				-
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	283,449,550			100%	319,000,000
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	6,996,000.00	PAD		3 Paket	5,000,000.00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	47,742,050.00	PAD		4 Paket	21,000,000.00

2.08.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	5,838,000.00	PAD		1 Paket	57,000,000.00
2.08.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	18,036,000.00	PAD		2 Paket	18,000,000.00
2.08.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	12,071,000.00	PAD		1 Paket	12,000,000.00
2.08.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	192,766,500.00	PAD		12 Laporan	206,000,000.00
2.08.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	393,938,000.00			100%	334,746,550
2.08.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	60 Unit	174,338,000	PAD		60 Unit	112,213,000
2.08.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	18 Unit	219,600,000	PAD		18 Unit	222,533,550
2.08.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100%	237,516,200			100%	90,900,000

2.08.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	117,299,400.00	PAD		12 Laporan	90,000,000.00
2.08.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	120,216,800.00	PAD		12 Laporan	900,000.00
2.08.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	177,295,000			100%	174,410,000
2.08.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79,030,000.00	PAD		2 Unit	79,060,000.00
2.08.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	7 Unit	80,805,000.00	PAD		7 Unit	75,350,000.00
2.08.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	26 Unit	17,460,000.00	PAD		26 Unit	20,000,000.00

2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil		11,50 / 75%	617,000,000			11.60 / 80%	617,000,000
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil		80%	152,000,000			85%	152,000,000
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	152,000,000.00	PAD		35 Dokumen	152,000,000.00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina		80%	465,000,000			85%	465,000,000

2.08.02.2. 02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	12 Dokumen	465,000,000.00	PAD		12 Dokumen	465,000,000.00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan		100%	220,000,000			100%	220,000,000
2.08.03.2. 01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		40%	220,000,000			40%	220,000,000
2.08.03.2. 01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	12 Dokumen	220,000,000.00	PAD		12 Dokumen	220,000,000.00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota		5	2,046,312,519			5.5	2,046,312,519

	KELUARGA	Batam							
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif		80%	2,046,312,519.00			85%	2,046,312,519.00
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	12 Laporan	2,046,312,519	PAD		12 Dokumen	2,046,312,519
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG		80%	190,000,000			85%	190,000,000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap		80%	190,000,000.00			85%	190,000,000.00

2.08.05.2. 01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	12 Dokumen	190,000,000	PAD		12 Dokumen	190,000,000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak		820	310,000,000			830	310,000,000
2.08.06.2. 01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA		70%	310,000,000.00			75%	310,000,000.00
2.08.06.2. 01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	310,000,000	PAD		12 Dokumen	310,000,000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan		100%	170,520,000			100%	170,520,000
2.08.07.2. 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		75%	101,500,000.00			75%	101,500,000.00

2.08.07.2. 01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Batam	40 orang	101,500,000	DAK Non Fisik BOPPA		40 Orang	101,500,000
2.08.07.2. 03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk		30%	69,020,000			30	69,020,000
2.08.07.2. 03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Batam	40 Orang	69,020,000	DAK Non Fisik BOPPA		40 Orang	69,020,000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,142,181,496				7,358,802,432
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK		60%	358,200,000			70%	358,200,000

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan		60%	45,000,000			70%	45,000,000
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	45,000,000.00	PAD		1 Dokumen	45,000,000.00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi		100%/50%	313,200,000			100% / 55%	313,200,000
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	60,000,000	DAK Non Fisik BOKB		12 Laporan	60,000,000
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	253,200,000.00	DAK Non Fisik BOKB		12 Laporan	253,200,000.00

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need		83.0 /8.50	4,336,651,600			84.03 /8.0	4,336,651,600
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi		100% / 50%	1,389,203,600.00			100% / 55%	1,389,203,600.00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam	96 Organisasi	100,000,000.00	DAK Non Fisik BOKB		96 Organisasi	100,000,000.00

2.14.03.2. 01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kota Batam	4 Dokumen	190,003,600	PAD		4 Dokumen	190,003,600
2.14.03.2. 01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	4 Dokumen	100,000,000	DAK Non Fisik BOKB		4 Dokumen	100,000,000

2.14.03.2. 01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	4 Laporan	180,000,000	DAK Non Fisik BOKB		4 Laporan	180,000,000
2.14.03.2. 01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	12 Laporan	739,200,000.00	DAK Non Fisik BOKB		4 Laporan	739,200,000
2.14.03.2. 01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		4 Laporan	80,000,000	DAK Non Fisik BOKB		4 Laporan	80,000,000.00
2.14.03.2. 02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif		70%	192,000,000.00			70%	192,000,000

2.14.03.2. 02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	552 Orang	192,000,000	DAK Non Fisik BOKB		562 Orang	192,000,000.00
2.14.03.2. 02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Batam	5 Laporan	1,051,974,000.00	DAK Fisik BOKB		5 Laporan	1,051,974,000.00
2.14.03.2. 03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB		84%	2,596,798,000.00			85%	2,596,798,000

2.14.03.2. 03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	12 Laporan	161,100,000	DAK Non Fisik BOKB		12 Laporan	161,100,000.00
2.14.03.2. 03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	625 Orang	1,383,724,000	DAK Non Fisik BOKB		650 Orang	1,383,724,000
2.14.03.2. 04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif		70%	158,650,000.00			70%	158,650,000.00

2.14.03.2. 04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	13 Kampung	158,650,000.00	DAK Non Fisik BOKB		13 Kampung	158,650,000.00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif		60%	2,447,329,896.00			65%	2,663,950,832.00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina		100%	2,447,329,896.00			100%	2,663,950,832.00
2.14.04.2. 01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Batam	20 Unit	120,000,000.00	DAK Non Fisik BOKB		20 Unit	120,000,000.00

2.14.04.2. 01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	94,259,969	PAD		12 Laporan	94,259,969.00
2.14.04.2. 01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	450 Orang	2,233,069,927.00	DAK Non Fisik BOKB		500 Orang	2,449,690,863
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				307,480,000.00				307,480,000.00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	72,000,000			100%	72,000,000.00

	KABUPATEN/KOTA								
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	12,000,000.00			100%	12,000,000
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	10,000,000.00	PAD		4 Paket	10,000,000.00
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	2,000,000	PAD		2 Paket	2,000,000.00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	60,000,000.00			100%	60,000,000
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	1 Unit	60,000,000.00	PAD		1 Unit	60,000,000.00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan		100%	77,565,000			100%	77,565,000.00

2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk		30%	77,565,000.00			30%	77,565,000
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	17 Layanan	77,565,000	DAK Non Fisik BOPPA		16 Layanan	77,565,000.00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan		100%	157,915,000			100%	157,915,000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		65%	157,915,000			65%	157,915,000
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Batam	52 Layanan	157,915,000	DAK Non Fisik BOPPA		52 Orang	157,915,000
TOTAL PAGU					22,688,471,387				21,156,987,238

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwujudkan melalui 10 (Sepuluh) program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Namun demikian, dari sepuluh program tersebut terdapat 1 (satu) program yang merupakan program rutin Setiap OPD, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sehingga yang menjadi program inti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ada 9 (Sembilan) yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
4. Program Perlindungan Perempuan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Program Pengendalian Penduduk

Program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan, yaitu:

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, yang dilaksanakan dalam satu kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan satu sub kegiatan, yaitu:
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang dilaksanakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA

- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

- Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - Pengendalian Program KKBPK
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

9. Program Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu program yang mendukung isu strategis pembangunan kota Batam periode 2021-2026 terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan yang memegang peran penting dalam upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam meningkatkan perekonomian dan kapasitas SDM perempuan kota Batam.

Demikian halnya melalui Program Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam berupaya memperbaiki taraf hidup keluarga yang masih rendah dan memberikan wawasan yang luas kepada masyarakat, Meningkatkan kualitas dan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga dan Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta KB, Meningkatkan akses, kualitas pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi yang merata, Meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, Meningkatkan kampanye pendewasaan usia perkawinan, menyediakan data primer tahapan keluarga di Kota Batam.

Dengan terbentuknya UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak maka untuk meningkatkan efisiensi kinerja pada UPTD maka program kegiatan subkegiatan di UPTD di lakukan disintegrasi mandiri. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada UPTD pada tahun 2025 sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan kegiatan :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kotaerempuan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Perlindungan Khusus Anak dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Tabel: 4.1.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025:

Program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diimplementasikan dalam bentuk beberapa indikator kegiatan yang tertera pada Tabel 4.1, dengan penjelasan sebagai berikut:

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2025(TAHUN RENCANA)			CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET KINERJA TAHUN 2025	PAGU KEBUTUHAN 2025	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22,688,471,387	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15,238,809,891	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	11,684,977,372	

2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	10,592,778,622	
2.08.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	62 Orang/bulan	10,592,778,622.00	
2.08.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	283,449,550	
2.08.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	6,996,000.00	
2.08.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	47,742,050.00	
2.08.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	5,838,000.00	
2.08.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	3 Paket	18,036,000.00	
2.08.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	12,071,000.00	

2.08.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	192,766,500.00	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		100%	393,938,000.00	
2.08.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	60 Unit	174,338,000	
2.08.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	18 Unit	219,600,000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		100%	237,516,200	
2.08.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	117,299,400.00	
2.08.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	120,216,800.00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	177,295,000	

2.08.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	2 Unit	79,030,000.00	
2.08.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	7 Unit	80,805,000.00	
2.08.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	26 Unit	17,460,000.00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam / Persentase perempuan yang dibina dan berhasil		11,50 / 75%	617,000,000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang dibina dan berhasil		80%	152,000,000	
2.08.02.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	35 Dokumen	152,000,000.00	

2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang dibina		80%	465,000,000	
2.08.02.2.02.001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	2 Dokumen	465,000,000.00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan		100%	220,000,000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		40%	220,000,000	
2.08.03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	57 Dokumen	220,000,000.00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam		5%	2,046,312,519	

2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader PKK dan perempuan yang dibina dan aktif		80%	2,046,312,519.00	
2.08.04.2.01.003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	12 Laporan	2,046,312,519	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang sudah memanfaatkan Data gender dan Anak dalam pelaksanaan Kebijakan PUG		80%	190,000,000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak yang terupdate dan lengkap		80%	190,000,000.00	
2.08.05.2.01.002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	44 Dokumen	190,000,000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak		820	310,000,000	

2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Layanan Anak yang telah memenuhi standard PHA		70%	310,000,000.00	
2.08.06.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	5 Dokumen	310,000,000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan		100%	170,520,000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		75%	101,500,000.00	
2.08.07.2.01.004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Batam	40 orang	101,500,000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk		30%	69,020,000	
2.08.07.2.03.006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Batam	40 Orang	69,020,000	

2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7,142,181,496	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase OPD yang telah melaksanakan kebijakan GDPK		60%	358,200,000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase OPD yang telah mengakomodir rekomendasi GDPK dalam kebijakan		60%	45,000,000	
2.14.02.2.01.0 002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 Dokumen	45,000,000.00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi		100%/ 50%	313,200,000	
2.14.02.2.02.0 009	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sistim informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan penyelenggaraan sistim Informasi Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	60,000,000	
2.14.02.2.02.0 012	Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Batam	12 Laporan	253,200,000.00	

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate), Unmeet Need		83.0 / 8.50	4,336,651,600	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Balai KB yang memenuhi standard pelayanan KB/ Persentase PUS yang ber KB baru/PUS yang mendapatkan sosialisasi		100% / 50%	1,389,203,600.00	
2.14.03.2.01.014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Batam	96 Organisasi	100,000,000.00	
2.14.03.2.01.013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kota Batam	4 Dokumen	190,003,600	

2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Batam	4 Dokumen	100,000,000	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Batam	4 Laporan	180,000,000	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	12 Laporan	739,200,000.00	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Batam	4 Laporan	80,000,000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga lini/kader yang aktif		70%	192,000,000.00	

2.14.03.2.02.004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Batam	552 Orang	192,000,000	
2.14.03.2.02.006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Batam	5 Laporan	1,051,974,000.00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang memenuhi standard pelayanan KB		84%	2,596,798,000.00	
2.14.03.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Kota Batam	12 Laporan	161,100,000	

		Jaringan dan Jejaringnya				
2.14.03.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Batam	625 Orang	1,383,724,000	
2.14.03.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Batam	12 Laporan	0.00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Presentase kampung KB yang aktif		70%	158,650,000.00	
2.14.03.2.04.006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Batam	13 Kampung	158,650,000.00	

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif		60%	2,447,329,896.00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan Keluarga yang dibina		100%	2,447,329,896.00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Batam	20 Unit	120,000,000.00	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Batam	12 Laporan	94,259,969	

2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Batam	450 Orang	2,233,069,927.00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				307,480,000.00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	72,000,000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	12,000,000.00	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	10,000,000.00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	2,000,000	

2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	60,000,000.00	
2.08.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	1 Unit	60,000,000.00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan yang terselesaikan		100%	77,565,000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti /dirujuk		30%	77,565,000.00	
2.08.03.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam	17 Layanan	77,565,000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pengaduan Anak yang terselesaikan		100%	157,915,000	

2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban tindak kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti		65%	157,915,000	
2.08.07.2.02.006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Batam	52 Layanan	157,915,000	
TOTAL					22,688,471,387	

Sumber Dana

Adapun sumber dana dari keseluruhan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjalankan program dan kegiatan bersumber dari dana APBD Kota Batam dan DANA DAK Fisik Non Fisik BOKB serta DAK Non Fisik BOPPA. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 10 (sepuluh) program yang telah dispesifikasi yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
10. Program Pengendalian Penduduk

Dengan pelaksanaan kesepuluh program ini, maka diharapkan dapat terpenuhi pendanaan dari APBD Kota Batam.

Demikian secara keseluruhan perolehan dana yang diharapkan untuk dapat mencapai kinerja yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan **“Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Menuju Keluarga yang Mandiri”** serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam periode Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam ini selayaknya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan – perbaikan seperlunya, sehingga secara umum dapat selaras dengan visi Kota Batam untuk dapat **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.”**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Jl. Raja Isa No. 17 Telp.(0778) 470691/Fax. (0778) 470692 Batam Centre
e-mail:dp3ap2kb@batam.go.id Website : <http://www.p3ap2kb.batam.go.id>

BATAM

Kode Pos: 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Nomor: 111 Tahun 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam tahun 2021-2026, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0378 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
22. Peraturan Walikota Batam Nomor 19 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam Tahun 2025 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam,

Pada tanggal 01 Desember 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam



NOVI HARMADYASTUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DP3APKB KOTA BATAM TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM TAHUN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	PENGARAH
2	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	PENANGGUNG JAWAB
3	PERENCANA AHLI MUDA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM	SEKRETARIS
I.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	Kabid. PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota

4	Analisis Kebijakan Ahli Muda PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga	Anggota
II.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK	
1	Kabid. Pemenuhan Hak Anak	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pengasuhan, Alternatif Pendidikan dan Budaya	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anggota
III.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN	
1	Kabid. Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan	Koordinator
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pencegahan & Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Data, Informasi, Perempuan dan Anak	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Perlindungan Anak	Anggota
IV.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
1	Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator

2	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Advokasi, Informasi, Edukasi dan Pengendalian Penduduk	Anggota
3	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
V.	PENANGGUNG JAWAB BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	
1	Kabid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Koordinator
2	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bina Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga	Anggota
3	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Anggota

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 1 Desember 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Batam



NOVI HARMADYA STUTI, S.Sos
NIP. 19761128 200212 2 006